

LAPORAN KINERJA INSTANSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



**KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA TAHUN
2026**

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan, yaitu peralihan dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2021–2026 menuju Renstra Tahun 2025–2029 yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Natuna periode terbaru. Pada periode sebelumnya, Renstra Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2021–2025 disusun untuk mendukung pelaksanaan Misi ke-6 Kepala Daerah, yaitu “Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (Smart Bureaucracy)”. Fokus utama Renstra tersebut diarahkan pada penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan efektivitas kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, serta penyederhanaan proses administrasi pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan inovatif. Dokumen Renstra Kecamatan Bunguran Timur memiliki 4 sasaran dan 4 Indikator sasaran

Seiring dengan pergantian Kepala Daerah, arah pembangunan daerah mengalami penajaman sebagaimana tercermin dalam Misi ke-4 Bupati Natuna Tahun 2025–2029, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi”. Misi ini menempatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi utama pembangunan daerah, dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Bunguran Timur dengan 3 sasaran dan 4 indikator sasaran yang mendukung kinerja Misi ke-4 Kepala Daerah.

Sasaran Renstra 2025-2029 yang relevan dengan RPJMD Kecamatan Bunguran Timur yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah dan pelayanan public dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan tujuan Renstra Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sasaran Indikator Kinerja Utama yaitu Meningkatnya kinerja dan layanan public perangkat daerah, Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan dan Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara.

Secara keseluruhan Kantor Kecamatan Bunguran Timur memiliki 6 (Enam) Program sarana strategis yang diwujudkan dalam 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 21

(Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan dianggarkan dari Alokasi Dana APBD sebesar **Rp. 9.186.119.692,00**. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar **Rp. 8.758.662.495,00** dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **95,35 %**, dari anggaran pembiayaan tersebut maka perlu diadakan pengukuran terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur di ukur berdasarkan tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas keberhasilan pengukuran kinerja tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui atas keberhasilan pencapaian sasaran kerja pada Kecamatan Bunguran Timur yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr, Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 ini telah selesai kami disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Bunguran Timur disampaikan dalam rangka memenuhi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

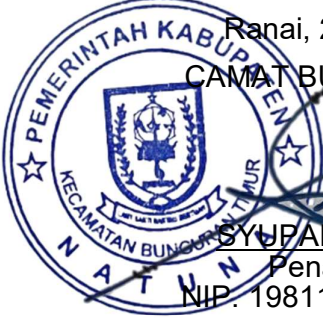
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Bunguran Timur ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Kecamatan Bunguran Timur selamatahun 2025, sebagai konsistensi atas komitmen untuk menciptakan transparansyang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang bersih(Clean Governance) dan baik (Good Governance).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instans Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Bunguran Timur ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuranatas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam bagian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bunguran Timur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LkjiP) Kecamatan Bunguran Timur juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Kecamatan Bunguran Timur dalam pencapaian tujuan dansasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kecamatan Bunguran Timur masa mendatang.

Kami menyadari bahwa Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Kecamatan Bunguran Timur.

Demikianlah laporan ini di sampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan Bunguran Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dimasa yang akan datang.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Ranai, 20 Januari 2026
CAMAT BUNGURAN TIMUR

SYUFARMAN, S.E., M.M
Penata Tk. I/III/d
NIP. 19811209 200701 1 005

DAFTAR ISI

ISI	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Kecamatan Bunguran Timur	1
1.1.1 Tugas Pokok	1
1.1.2 Struktur Organisasi dan Susunan Kepegaiwan	4
1.2 Isu Strategis	8
1.3 Permasalahan	9
1.4 Landasan Hukum	9
1.5 Sistematika Penulisan	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur	12
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bunguran Timur .	16
2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunguran Timur	16
2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
2.3.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	26
3.2 Analisis Kinerja	27
3.3 Analisis Kinerja Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Rekomendasi.....	39
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kecamatan	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk.....	4
Tabel 1.3	Nama-nama Pejabat Kecamatan	6
Tabel 1.4	Nama-nama Lurah dan Kepala Desa	6
Tabel 1.5	Jumlah PNS dan PTT	7
Tabel 1.6	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 2.1.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 2021-2026	14
Tabel 2.1.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 2021-2026	14
Tabel 2.2.1	Indikator Kinerja Utama 2021-2026.....	15
Tabel 2.2.2	Indikator Kinerja Utama 2025-2029.....	16
Tabel 2.3.1.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
Tabel 2.3.1.2	Program dan Kegiatan Mendukung IKU Tahun 2025	18
Tabel 2.3.1.3	Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung IKU Tahun 2025.....	20
Tabel 2.3.2.1	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
Tabel 2.3.2.2	Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung IKU Tahun 2025.....	23
Tabel 3.2.1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.....	28
Tabel 3.2.2	Capaian Indikator Kinerja IKM Tahun 2025.....	28
Tabel 3.2.3	Nilai Unsur SKM Tahun 2025	29
Tabel 3.2.4	Perbandingan IKM Tahun Sebelumnya	30
Tabel 3.2.5	Capaian Indikator Kinerja IPP Tahun 2025	31
Tabel 3.2.6	Capaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	33
Tabel 3.2.7	Capaian Kinerja Program Kecamatan Bunguran Timur	33
Tabel 3.3.1	Capaian Penyerapan Pelaksanaan Anggaran	34

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Kecamatan	5
Bagan 2.1.1	Matrik Perubahan Misi Kepala Daerah	13

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat SM I Tahun 2025
4. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat SM II Tahun 2025
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
6. Cascading Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025
7. Crosscutting Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Kecamatan Bunguran Timur

1.1.1 Tugas Pokok

Sesuai dengan **Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022** tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan. Kecamatan Bunguran Timur merupakan suatu bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintah (Pasal 1 ayat 5 dan 6).

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan Kecamatan yang didukung oleh struktur dibawah terdiri dari :

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyusun kebijakan operasional dan program kerja sekretariat Kecamatan, mengkoordinasikan tugas dan fungsi kerja sub bagian yang ada di sekretariat, pengelolaan sarana dan prasarana aparatur serta penyelenggaraan pelayanan kehumasan serta mengkoordinasikan tugas Camat.
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas di bidang penyimpanan bahan, pengendalian perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun dan membantu Camat dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan, urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas serta membantu Camat dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas serta membantu Camat dalam lingkup ketentraman dan ketertiban umum.
5. Lurah mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan dan kesejahteraan sosial serta ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan.
 - a. Sekretarias Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dalam pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kelurahan dan melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam lingkup kesekretariatan
 - b. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam lingkup tata pemerintahan
 - c. Seksi Pemberdayaan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan pemberdayaan masyarakat, pembinaan pembangunan ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup, kesejahteraan sosial.
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok urusan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kebersihan lingkungan hidup serta membantu Lurah dalam lingkup ketentraman dan ketertiban umum.

Kecamatan Bunguran Timur merupakan salah satu kecamatan induk yang ada di Kabupaten Natuna dengan 6 wilayah administratif yang terdiri dari 4 Kelurahan dan 3 Desa. Kecamatan Bunguran Timur berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Timur Laut disebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Selatan disebelah Selatan, berbatasan dengan Laut Natuna disebelah Timur dan berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Tengah dan Kecamatan Bunguran Barat disebelah barat.

Secara geografis, Kecamatan Bunguran Timur berada di titik koordinat 03°46'50" – 03°59'56" LU (Lintang Utara) dan 108°12'20" – 108°24'14' BT (Bujur Timur), dengan luas daratan 148,78 Km². Karakteristik daratan dan pesisir yaitu perbukitan dan bebatuan.

Kecamatan Bunguran Timur berkedudukan di Pulau Bunguran Besar dengan pusat pemerintahannya terletak di Jln. Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku Kecamatan Bunguran Timur dengan ibukota kecamatan terletak di Ranai Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur, dengan luas wilayah Kecamatan Bunguran Timur ± 148,78 Km² terbagi ke dalam 4 Kelurahan dan 3 Desa dapat dilihat pada table 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Luas Wilayah Kelurahan dan Desa
Kecamatan Bunguran Timur, 2025

Kelurahan/Desa	Luas Wilayah Daratam (Km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
(1)	(2)	(3)
Kelurahan		
Kelurahan Ranai Kota	8,76	5,89
Kelurahan Bandarsyah	22,52	15,13
Kelurahan Ranai Darat	9,01	6,06
Kelurahan Batu Hitam	6,89	4,63
Desa		
Desa Sungai Ulu	41,38	27,81
Desa Batu Gajah	46,92	31,54
Desa Sepempang	13,30	8,94
Jumlah	148,78	100

Sumber Data : Kecamatan Bunguran Timur Dalam Angka, 2025

Jumlah penduduk Kecamatan Bunguran Timur pada tahun 2025 berjumlah 29.154 jiwa yang terdiri dari 14. 715 penduduk laki -laki dan 14.439 penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,91 yang artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 hingga 102 penduduk laki -laki. Jika dilihat dari persebarannya, penduduk di Kecamatan Bunguran Timur terbanyak berada di

Kelurahan Ranai Kota sebesar 9.115 jiwa, dan penduduk tersedikit berada di Desa Batu Gajah yang hanya berpenduduk 1. 191 jiwa. Untuk sebaran penduduk Kecamatan Bunguran Timur dapat dilihat pada table 1.4.2 berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kecamatan Bunguran Timur, 2024

Kelurahan/Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	3	4
Kelurahan Ranai Kota	3.950	3.865	7.815
Kelurahan Bandarsyah	3.014	2.897	5.911
Kelurahan Ranai Darat	1.845	1.804	3.649
Kelurahan Batu Hitam	2.750	2.712	5.462
Desa Sungai Ulu	1.054	995	2.049
Desa Batu Gajah	703	698	1.401
Desa Sepempang	1.012	987	1.999
Jumlah	14.328	13.958	28.286

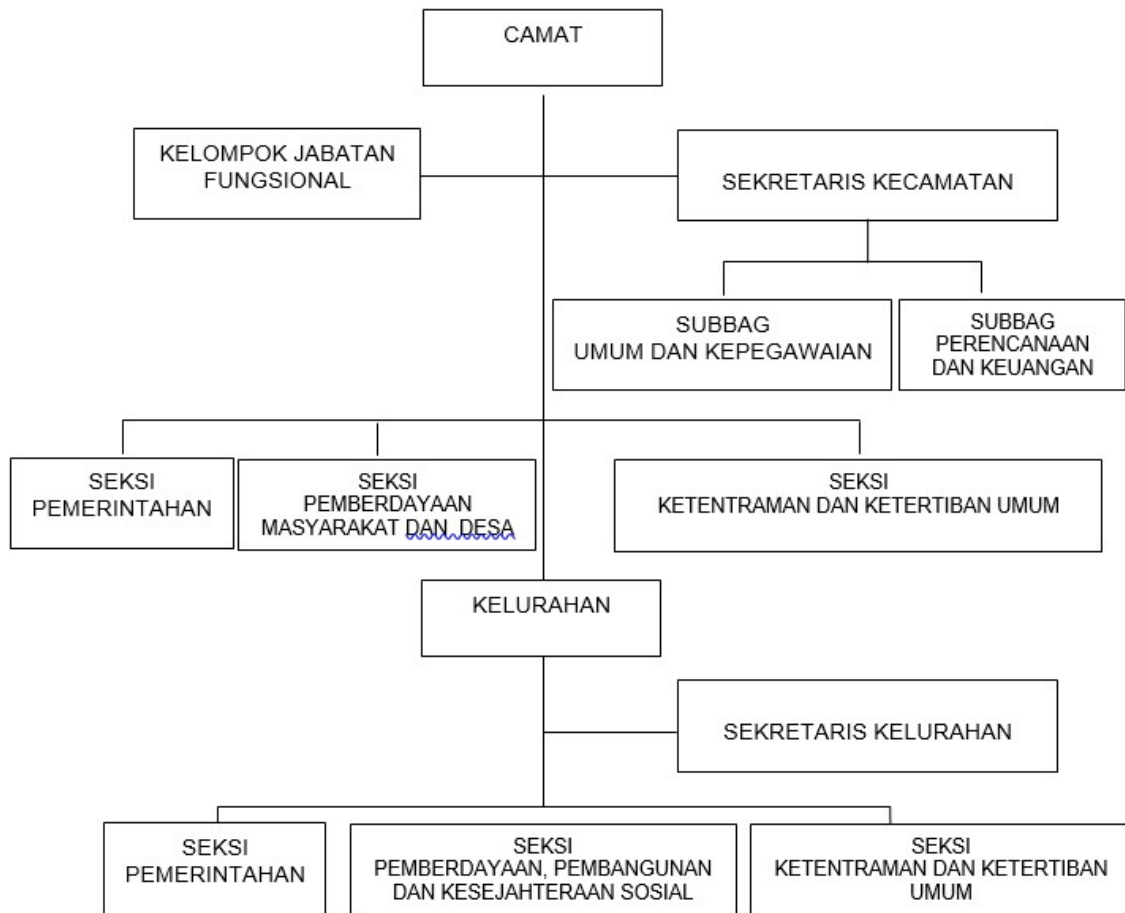
Sumber Data : Profil Kecamatan Bunguran Timur 2024

1.1.2 Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Adapun susunan organisasi Kantor Kecamatan Bunguran Timur adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bunguran Timur
Tahun 2025



Dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Kecamatan Bunguran Timur membawahi pemerintahan Kelurahan dan Desa dimana Pemerintah Kelurahan dan Desa merupakan Struktur Pemerintahan tingkat terkecil Daerah yang mana Kepala Pemerintahan Kelurahan dan Desa bertanggung jawab kepada Camat sebagai atasan langsung. Kecamatan Bunguran Timur terdiri dari 3 Desa (Desa Sungai Ulu, Desa Sepempang dan Desa Batu Gajah) dan 4 Kelurahan (Kelurahan Ranai Kota, Kelurahan Bandarsyah, Kelurahan Batu Hitam dan Kelurahan Ranai Darat) dengan 17 dusun / lingkungan, 119 RT dan 34 RW.

Selanjutnya sebagai partisipasi aktif dari masyarakat guna mendukung jalannya pemerintahan ditingkat Kelurahan dan Desa maka dibentuklah RT dan RW sesuai dengan Permendagri Nomor 07 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Maka Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah

organisasi masyarakat yang dibina oleh Pemerintah yang berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah dengan operasional yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan pemerintahan setempat dan tidak tertutup kemungkinan masing-masing wilayah atau daerah tertentu mempunyai tatacara yang berbeda baik nama atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai organisasi kemasyarakatan. Dewasa ini peranserta perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sangat penting karena langsung bersentuhan dengan masyarakat karena, selain menjadi perangkat terkecil dari Pemerintah

Tabel 1.3

Nama-nama Pejabat Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur, 2025

Jabatan	Nama Pejabat
1	2
Camat	Syuparman, S.E.,M.M
Sekretaris Kecamatan	Wan Ridduan, S.IP
Kasi Pemerintahan	Dewi Fitriani, S.Pd.I
Kasi PMD	Rosakniah, S.IP
Kasi Trantibum	Habibi Agussami, S.E
Kasuubbag Perencanaan dan Keuangan	Dilla Sonya, S.STP
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Yulia Fitriyanti, S.IP

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2025

Tabel 1.4

Nama-nama Lurah dan Kepala Desa Kecamatan Bunguran Timur, 2025

Jabatan	Nama Pejabat
1	2
Lurah Ranai Kota	Syarnizar, S.Par
Lurah Ranai Darat	A. Era Juein Marisa, S.Sos
Lurah Bandarsyah	Ervan Hamdani, S.E
Lurah Batu Hitam	Hamdani, S.A.P
Kepala Desa Sungai Ulu	Supriyanto
Kepala Desa Batu Gajah	Kurniawan Sidro Utomo
Kepala Desa Sepempang	Muhammad Sholihin

Sumber Data : Seksi PMD, 2025

Tabel 1.5

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan PTT dikantor Kecamatan Bunguran Timur, Kelurahan dan Desa Kecamatan Bunguran Timur, 2025

Kantor	PNS	PPPK	Perangkat Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Kecamatan Bunguran Timur	16	9	-
Kelurahan Ranai Kota	8	8	-
Kelurahan Ranai Darat	9	9	-
Kelurahan Bandarsyah	6	7	-
Kelurahan Batu Hitam	9	6	-
Desa Sepempang		-	12
Desa Sungai Ulu	-	-	11
Desa Batu Gajah	-	-	16
Jumlah	48	39	39

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2025

Tabel 1.6
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SD	0	0	0
2	SLTP	3	3	0
3	SLTA	40	22	18
4	DIPLOMA	4	2	2
5	SARJANA STRATA 1	39	28	11
6	SARJANA STRATA 2	1	1	0
JUMLAH		87	56	31

Berdasarkan data tahun 2025, SDM pendukung Kecamatan Bunguran Timur terdiri dari 48 PNS, 39 PPPK, dan 39 Perangkat Desa yang tersebar di kantor kecamatan, empat kelurahan, dan tiga desa. Komposisi ini menunjukkan bahwa dukungan aparatur relatif memadai dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, meskipun tetap diperlukan peningkatan kapasitas dan pemerataan beban kerja untuk mengoptimalkan kinerja organisasi.

1.2 Isu Strategis

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sebagai berikut :

1. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel semakin meningkat, sehingga diperlukan penguatan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi aparatur.

2. Penguatan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

Implementasi SAKIP dan pengukuran kinerja berbasis hasil (outcome) masih perlu ditingkatkan agar selaras antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Kualitas usulan Musrenbang dan sinkronisasi dengan prioritas kabupaten masih perlu diperkuat agar lebih tepat sasaran.

4. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Peran kecamatan sebagai perangkat daerah kewilayahan menuntut peningkatan sinergi dengan desa/kelurahan dan instansi terkait.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Pemerintahan

Digitalisasi pelayanan dan administrasi pemerintahan belum sepenuhnya optimal.

1.3 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bunguran Timur memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang dapat berdampak luas kepada peningkatan kinerja organisasi serta peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah:

1. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur dibandingkan dengan beban kerja pelayanan.
2. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum sepenuhnya memadai.
3. Masih adanya keterlambatan atau ketidaktepatan administrasi pelayanan akibat keterbatasan sistem pendukung.
4. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara desa/kelurahan dan kecamatan belum optimal.
5. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan dan regulasi masih beragam.
6. Keterbatasan pagu anggaran yang berdampak pada ruang gerak pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Natuna Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2025 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Penilaian Kinerja Organisasi

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- 1.1. Gambaran Umum
- 1.2. Isu Strategis
- 1.3. Permasalahan
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- 2.1 Rencana Stratesgi Kecamatan Bunguran Timur Tahun
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bunguran Timur

2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunguran Timur

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini di sajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan reaslisasi anggaran.

3.1. Pengukuran Kinerja

3.2. Analisis Kinerja

3.3. Analisis Kinerja Anggaran

BAB IV : PENUTUP

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

4.1 Kesimpulan

4.2 Rekomendasi

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
4. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 SM I
5. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 SM II
6. Cascading Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025
7. Crosscutting Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur

Perencanaan strategis Kecamatan Bunguran Timur yang disajikan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memuat arah kebijakan, skala prioritas serta strategis yang dilakukan untuk melaksanakan rencana-rencana kerja yang bersifat indikatif. Dalam rencana strategis disusun untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks yang tersusun secara terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil (ultimate outcome).

Penyusunan Rencana Strategis merupakan Langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyelaraskan visi dan misi dengan memperhatikan potensi, tantangan, peluang yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja.

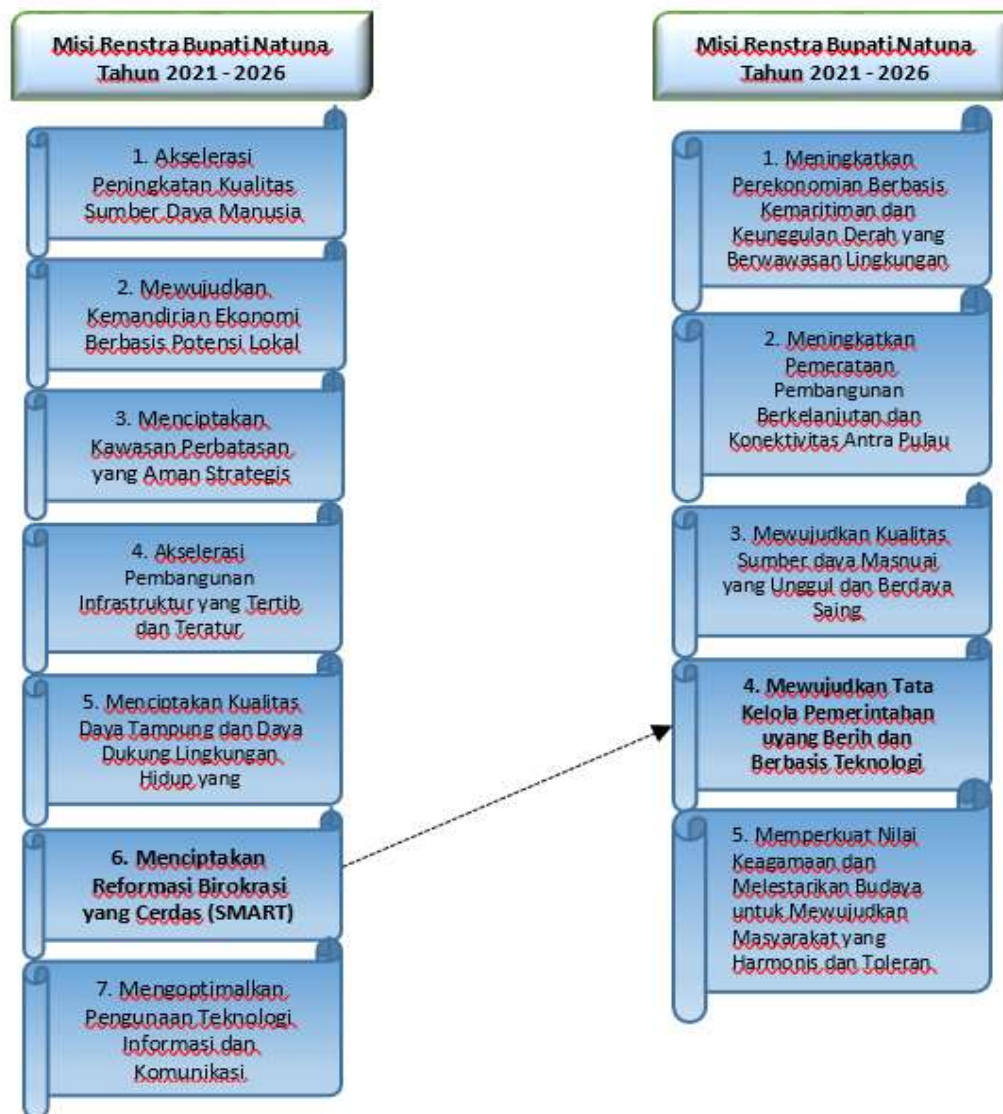
Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah pada periode kepemimpinan Bupati Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2025–2029. Perubahan ini sekaligus merupakan respons atas dinamika lingkungan strategis, perkembangan regulasi, serta tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.

Pada periode sebelumnya, Renstra Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2021–2025 disusun untuk mendukung pelaksanaan Misi ke-6 Kepala Daerah, yaitu “Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (Smart Bureaucracy)”. Fokus utama Renstra tersebut diarahkan pada penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan efektivitas kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, serta penyederhanaan proses administrasi pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan inovatif.

Seiring dengan pergantian kepemimpinan daerah, arah pembangunan daerah mengalami penajaman sebagaimana tercermin dalam Misi ke-4 Bupati Tahun 2025–2029, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi”. Misi ini menempatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas,

transparan, dan akuntabel sebagai fondasi utama pembangunan daerah, dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh proses penyelenggaraa pemerintahan. Berikut ini matrik perubahannya :

Bagan 2.1.1
MATRIK PERUBAHAN MISI KEPALA DAERAH



Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, kondisi awal, serta target kinerja tahunan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama periode perencanaan.

Tabel 2.1.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Pengamalan Agama	Persentase Rumah Ibadah yang Aktif Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pembinaan di Bidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dibina	0	70	70	80	80	90	90
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase penanganan pelanggaran masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	0	70	75	80	85	90	90
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	72.34	79.90	79.95	80.00	80.00	80.00	80,00
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.48	3.49	3.50	3.51	3.52	3.53	3.53

Dalam rangka menjamin keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025–2029. Adapun perubahan tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 1	Target 2	Target 3	Target 4	Target 5
4.1.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4.1.1.1.1. Meningkatkan Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3.05	3.08	3.10	3.15	3.18	3.20
4.1.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4.1.2.1.1. Meningkatkan Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,40	71.20	71.50	72.00	72.50	73.00
4.1.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Persentase rumah ibadah yang aktif ditingkat kecamatan	5.1.1.1.1. Meningkatkan pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	70	70	70	80	80	90

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 1	Target 2	Target 3	Target 4	Target 5
4.1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	5.1.1.2.1. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	65	70	75	80	85	90

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bunguran Timur

Sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyesuaian dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bunguran Timur, diperlukan penyajian perbandingan Indikator Kinerja Utama (IKU) antara periode Tahun 2021–2026 dan periode Tahun 2025–2029.

Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya serta penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arah kebijakan pembangunan daerah yang terbaru. Adapun perbandingan dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TAHUN 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	Survey Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.2.1 menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bunguran Timur periode Tahun 2021–2026 yang menetapkan sasaran strategis “*Meningkatnya Kepuasan Masyarakat*” dengan indikator kinerja berupa **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Pengukuran dilakukan berdasarkan nilai indeks yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagai sumber data utama. Pada periode ini, fokus pengukuran kinerja lebih menitikberatkan pada persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.

Tabel 2.2.2

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
TAHUN 2025-2029**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Deskripsi Indikator	Deskripsi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait. Indikator ini mencerminkan sejauh mana layanan publik memenuhi standar prosedur, cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Indeks Pelayanan Publik adalah Indeks yang mengukur kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik, akuntabilitas, responsivitas, inovasi, dan pengelolaan pengaduan.	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sebagaimana pada Tabel 2.2.2, terdapat perubahan pada periode Tahun 2025–2029 dimana sasaran strategis diarahkan menjadi “*Meningkatnya Pelayanan Publik*” dengan indikator kinerja berupa **Indeks Pelayanan Publik (IPP)**. Perubahan ini tidak hanya bersifat redaksional, namun juga substantif, karena IPP mengukur kualitas pelayanan secara lebih komprehensif, meliputi aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem pelayanan, serta pengelolaan pengaduan. Sumber data pengukuran berasal dari hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan demikian, perubahan IKU dari periode 2021–2026 ke periode 2025–2029 mencerminkan penguatan orientasi kinerja Kecamatan Bunguran Timur dari sekadar pengukuran tingkat kepuasan masyarakat menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara menyeluruh, terukur, dan akuntabel.

2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025

2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Camat

Bunguran Timur menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Perjanjian kinerja disusun dengan memperhatikan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Secara ringkas Perjanjian Kinerja tertuang dalam rencana program dan kegiatan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 yang mendukung kinerja utama sebagai berikut

Tabel. 2.3.1.1

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.52

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	7.679.353.188,00
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	2.208.263.000,00
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	21.000.000,00
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	10.600.000,00
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Rp.	44.375.000,00
Jumlah	Rp.	9.963.591.188,00

Ranai, 13 Januari 2025

Bupati Natuna,



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pt. Camat Bunguran Timur



HARMIDI, S.A.P.
NIP. 197401011998031008

Dalam mendukung **Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kecamatan Bunguran Timur** menetapkan sasaran strategis “*Meningkatnya Kepuasan Masyarakat*” dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dan target sebesar **3,52**. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, dialokasikan anggaran melalui 5(lima) program utama dengan total anggaran sebesar **Rp 9.963.591.188,00** yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dalam table matrik dibawah ini :

Tabel 2.3.1.2

**Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROG/KEG/SUBKEG	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pembinaan di Bidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dibina	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	Persen	20
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100
		Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1
Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase penanganan pelanggaran masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	15
		Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persen	90
		Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	80
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	80
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	90
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah	54
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	95
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROG/KEG/SUBKEG	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Unit	5
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	65
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Persen	100
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	8
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen	100
		Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100
		Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROG/KEG/SUBKEG	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		

Agar tercapainya Sasaran Indikator Kinerja Utama maka telah ditetapkan Program dan Kegiatan di Kecamatan Bunguran Timur yang diprioritaskan mendukung Sasaran IKU tersebut. Setiap Program dan Kegiatan untuk mendukung IKU telah di tetapkan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.3.1.3
Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung IKU

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROG/KEG/SUBKEG	SATUAN	TARGET	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	Persen	20	-
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	-
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	15	10.600.000,00
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	90	10.600.000,00
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	10.600.000,00
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	80	10.500.000,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	80	10.500.000,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10.500.000,00
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	90	7.668.853.188,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	6.416.054.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah	54	6.416.054.000,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	95	266.466.550,00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROG/KEG/SUBKEG	SATUAN	TARGET	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	44.866.500,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	13.000.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	40.000.000,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	168.600.000,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	919.674.188,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7.000.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	37.101.300,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	875.572.888,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	66.658.500,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	61.658.500,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Unit	5	5.000.000,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	2.208.263.000,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	65	2.208.263.000,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	2.208.263.000,00
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Persen	100	21.000.000,00
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	21.000.000,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	8	21.000.000,00
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen	100	44.375.000,00
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	44.375.000,00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROG/KEG/SUBKEG	SATUAN	TARGET	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	34.000.000,00
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	10.375.000,00
JUMLAH					9.963.591.188,00

2.3.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam rangka menjamin keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025–2029.

Penyelarasan IKU (Indikator Kinerja Utama): Dilakukan penyesuaian terhadap rumusan indikator agar selaras dengan orientasi strategis Renstra 2025-2029 yang lebih menekankan pada transformasi tata kelola dan penguatan fungsi fasilitasi yang adaptif.

Penyesuaian Target: Target kinerja direskalasi untuk mencerminkan baseline awal periode perencanaan 2025-2029, guna memastikan capaian di tahun pertama (2025) menjadi pondasi yang kuat bagi tahun-tahun berikutnya.

Sinkronisasi Nomenklatur: Penyesuaian nama program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam PK mengikuti aturan nomenklatur terbaru agar tercipta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Tabel 2.3.2.1

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.05

Jumlah Anggaran :

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.428.274,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.132.801.400,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.996.209.150,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.858.358,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.948.720,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	39.873.790,00
Total	9.186.119.692,00



Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

SYUPARMAN, S.E., M.M.
NIP. 19811209 200701 1 005

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Bunguran Timur yang menetapkan sasaran “*Meningkatnya Pelayanan Publik*” dengan indikator kinerja **Indeks Pelayanan Publik** dan target sebesar **3,05**. Untung mendukung pencapaian target tersebut, dialokasi anggaran melalui 6 (Enam) program utama dengan total anggaran sebesar **Rp 9.186.119.692,00** yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan dan subkegiatan dalam table matrik dibawah ini :

Tabel 2.3.2.2

Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung IKU

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROG/KEG/SUBKEG	SATUAN	TARGET	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	Persen	20	3.428.274,00
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	3.428.274,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	3.428.274,00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROG/KEG/SUBKEG	SATUAN	TARGET	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	15	9.948.720,00
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persen	90	9.948.720,00
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	9.948.720,00
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	80	4.299.680,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	80	4.299.680,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.299.680,00
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	90	7.128.501.720,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	5.924.846.599,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah	54	5.924.846.599,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	2.108.322,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	2.108.322,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	95	133.926.014,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	10.647.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	27.550.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3.950.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	42.800.000,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	48.979.014,00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	159.539.462,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Unit	4	39.600.000,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	Unit	5	119.939.462,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	869.038.389,00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROG/KEG/SUBKEG	SATUAN	TARGET	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.800.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	78.694.001
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	787.544.388,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	39.042.924,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	36.542.924,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Unit	5	2.500.000,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	1.996.209.150,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	65	1.996.209.150,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	1.996.209.150,00
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Persen	100	3.858.358,00
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	3.858.358,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	8	3.858.358,00
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen	100	39.873.790,00
	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	39.873.790,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	35.398.790,00
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	4.475.000,00
JUMLAH					9.186.119.692,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran . hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Natuna .

Laporan Kinerja Kecamatan Bunguran Timur tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur yang telah dicapai.

1.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Natuna dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* atau *output* dengan realisasi kinerja Aktual Tahun 2025 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Pengukuran kinerja mencakup beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, *benchmarking* dan perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau Standard Pelayanan Minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja masing-masing OPD, data kepustakaan yang diperlukan kemudian diolah, dievaluasi dan dianalisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Natuna. Formulir bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana (Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

3.2. Analisis Kinerja

Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada tahun 2025, berhasil menunjukkan capaian kinerja yang signifikan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui koordinasi yang solid, pelaksanaan tugas-tugas strategis berhasil diwujudkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Capaian ini tidak hanya mencerminkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam memberikan pelayanan administratif kepada perangkat daerah, tetapi juga memperlihatkan komitmen yang tinggi dalam mendukung keberhasilan program prioritas pembangunan daerah. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Kecamatan Bunguran Timur terus berkontribusi sebagai penggerak utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.2.1
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Semester I dan II Tahun 2025

Periode Survey	Jumlah Responden	Nilai IKM
Semester I	97	3.68
Semester II	86	3.83
Rata-Rata	183	3.76

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025, pada Semester I jumlah responden tercatat sebanyak 97 orang dengan nilai IKM sebesar 3,68, sedangkan pada Semester II jumlah responden sebanyak 86 orang dengan nilai IKM sebesar 3,83. Secara rata-rata, nilai IKM Tahun 2025 mencapai 3,76, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan pada semester kedua serta menggambarkan kinerja pelayanan publik Kecamatan Bunguran Timur berada pada kategori baik.

Tabel 3.2.2
Capaian Indikator Kinerja IKM
Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,52	3,76	106,82

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025, dengan sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”. Pada tabel tersebut ditetapkan target IKM sebesar 3,52 dengan satuan indeks, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 3,76. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 106,82%, yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Hasil ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Bunguran Timur selama Tahun 2025 berada pada kategori baik serta menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan dibandingkan dengan target yang direncanakan. Adapun hasil survey per unsur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.3
Nilai Unsur Survey Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur SKM	NRR	
		SM I	SM II
1	2	3	4
1.	Persyaratan Pelayanan	3.55	3,88
2.	Prosedur Pelayanan	3.70	3,87
3.	Waktu Pelayanan	3.64	3,85
4.	Biaya / Tarif pelayanan	3.99	4.00
5.	Produk Pelayanan	3.80	3,91
6.	Kompetensi Petugas Pelayanan	3.60	3,80
7.	Perilaku Petugas Pelayanan	3.69	3,92
8.	Sarana dan Prasarana	3.65	3,72
9.	Penanganan Pengaduan Layanan	3.81	3,86
	NRR Tertimbang	3.68	3,83
	Nilai IKM	91.94 (Sangat Baik)	94,50 (Sangat Baik)

Sumber : Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025

Berdasarkan Tabel Nilai Unsur Survei Kepuasan Masyarakat diatas, unsur dengan nilai terendah pada Semester I adalah **Persyaratan Pelayanan** dengan nilai 3,55, sedangkan pada Semester II unsur dengan nilai terendah adalah **Sarana dan Prasarana** dengan nilai 3,72.

Pada Semester I, rendahnya nilai Persyaratan Pelayanan mengindikasikan masih adanya persepsi masyarakat bahwa informasi terkait kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi belum sepenuhnya mudah dipahami atau belum tersosialisasi secara optimal. Permasalahan yang muncul antara lain kurangnya media informasi yang informatif dan mudah diakses, serta masih adanya masyarakat yang belum memahami standar pelayanan yang berlaku. Sebagai rencana tindak lanjut, Kecamatan Bunguran Timur melakukan penyempurnaan dan publikasi ulang standar pelayanan melalui pemasangan banner dan papan informasi, optimalisasi media sosial, serta pemberian penjelasan langsung oleh petugas layanan sebelum proses administrasi dimulai.

Sementara itu, pada Semester II unsur Sarana dan Prasarana memperoleh nilai terendah meskipun masih dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan masih adanya keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan seperti ruang tunggu, kenyamanan tempat layanan, maupun fasilitas penunjang lainnya. Permasalahan tersebut menjadi perhatian untuk dilakukan pembenahan melalui penataan ulang ruang pelayanan, pemeliharaan fasilitas yang ada, serta pengusulan pengadaan sarana dan prasarana pendukung melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah.

Secara umum, meskipun kedua unsur tersebut memperoleh nilai terendah pada masing-masing semester, seluruh unsur tetap berada dalam kategori baik, namun tetap memerlukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara lebih optimal pada tahun berikutnya.

Table 3.2.45
Perbandingan IKM Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.50	3.69	105.43%	3.51	3.73	106.27	3.52	3.76	106.82

Berdasarkan tabel Perbandingan IKM Tahun Sebelumnya, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bunguran Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2023, realisasi IKM sebesar 3,69 dari target 3,50 dengan capaian 105,43%. Tahun 2024 mengalami peningkatan dengan realisasi 3,73 dari target 3,51 atau capaian 106,27%. Selanjutnya pada Tahun 2025, realisasi kembali meningkat menjadi 3,76 dari target 3,52 dengan capaian 106,82%. Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik tidak hanya selalu melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga mengalami peningkatan kualitas secara berkelanjutan setiap tahunnya, yang mencerminkan komitmen Kecamatan Bunguran Timur dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan dinamika kebijakan dan penguatan sistem evaluasi pelayanan publik, pengukuran kinerja yang semula menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara bertahap diarahkan menuju Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai

indikator yang lebih komprehensif. Jika IKM berfokus pada persepsi kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur layanan, maka IPP menilai kualitas pelayanan secara lebih menyeluruh, meliputi aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, serta pengelolaan pengaduan. Peralihan ini mencerminkan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja yang tidak hanya mengukur hasil akhir berupa tingkat kepuasan, tetapi juga menilai tata kelola dan standar penyelenggaraan pelayanan publik secara sistematis, sehingga diharapkan mampu mendorong perbaikan kualitas layanan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di Kecamatan Bunguran Timur.

Tabel 3.2.5
Capaian Indikator Kinerja IPP
Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target (Realisasi IPP Pemda)	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.46	3,05	68.39

Tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa sasaran **“Meningkatnya Pelayanan Publik”** dengan indikator **Indeks Pelayanan Publik (IPP)** memiliki target sebesar 4,46 (mengacu pada realisasi IPP Pemerintah Daerah), sedangkan realisasi yang dicapai Kecamatan Bunguran Timur sebesar 3,05 dengan tingkat capaian 68,39%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pelayanan publik di tingkat kecamatan masih perlu ditingkatkan agar lebih selaras dengan standar dan target yang telah ditetapkan.

Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, penguatan kompetensi aparatur, serta sistem pengelolaan pengaduan dan informasi pelayanan publik yang masih perlu disempurnakan.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, Kecamatan Bunguran Timur akan melakukan penataan dan pemutakhiran standar pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur melalui pembinaan dan pelatihan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta

mengusulkan penguatan sarana dan prasarana melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi berkala terhadap hasil survei dan rekomendasi perbaikan akan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan, sehingga nilai IPP pada tahun berikutnya dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

Tabel 3.2.6
Capaian Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2021)	Kondisi Akhir (2026)	Target				Realisasi				Capaian			
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Pengamalan Agama	Persentase Rumah Ibadah yang Aktif Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pembinaan di Bidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dibina	0	90	70	70	80	80	70	70	80	80	100	100	100	100
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase penanganan pelanggaran masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	0	90	70	75	80	85	70	75	80	85	100	100	100	100
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	72.34	80,00	79.90	79.95	80.00	80.00	65.65	71.20	70.40	-	82.17	89.06	88,00	-
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.48	3.53	3.49	3.50	3.51	3.52	3.64	3.69	3.73	3.76	104,30	105,43	106,28	106,82

Tabel 3.2.7
Capaian Kinerja Program Kecamatan Bunguran Timur

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Akhir RENSTRA (2026)	Target				Realisasi				Capaian			
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Program Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	0	100	100	100	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79,87	80	79,90	79,95	80,00	80,00	72,34	65,65	71,20	70,40	90,54	82,11	89,05	88,00
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	80	90	80	85	85	90	80	85	85	90	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persen	0	100	100	100	100	100	85	90	90	90	85	90,00	90,00	90,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Persen	0	100	100	100	100	100	80	95	95	95	80	95,00	95,00	95,00
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	0	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80,00	80,00	80,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00

3.3 Analisis Kinerja Anggaran

Pada tahun anggaran 2025, Sekretariat Daerah awalnya memproyeksikan pagu Rencana Kerja sebesar Rp.9.963.591.188,00. Namun, dalam perjalanannya, jumlah yang diakomodir ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengalami penyesuaian menjadi Rp.9.168.119.692,00. Perubahan ini merupakan langkah responsif pemerintah daerah dalam menyelaraskan perencanaan keuangan dengan dinamika kebijakan fiskal yang berlaku di tingkat pusat maupun daerah.

Perubahan signifikan pada postur anggaran ini didorong oleh implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai kebijakan efisiensi nasional. Sebagai tindak lanjut dari mandat tersebut, Sekretariat Daerah melakukan proses rasionalisasi anggaran secara intensif yang dituangkan melalui 5 (lima) kali perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana tetap berada pada koridor prioritas nasional yang menekankan pada penghematan dan efektivitas penggunaan uang negara.

Sebagai hasil dari kebijakan efisiensi tersebut, daerah berhasil melakukan penghematan sebesar 7,98 persen atau setara dengan Rp 795.471.496,00. Dengan adanya rasionalisasi ini, data realisasi belanja hingga akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp 8.758.662.495,00. Berikut ini tabel capaian penyerapan pelaksanaan Anggaran.

Tabel 3.3.1
Capaian Penyerapan Pelaksanaan Anggaran

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	3.428.274,00	1.714.137,00	50,00
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	3.428.274,00	1.714.137,00	50,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	3.428.274,00	1.714.137,00	50,00
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.600.000,00	9.948.720,00	8.613.430,00	86,58
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.600.000,00	9.948.720,00	8.613.430,00	86,58
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.600.000,00	9.948.720,00	8.613.430,00	86,58
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.500.000,00	4.299.680,00	2.514.817,00	58,49

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	4.299.680,00	2.514.817,00	58,49
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.500.000,00	4.299.680,00	2.514.817,00	58,49
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.668.853.188,00	7.128.501.720,00	6.737.619.544,00	94,52
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.416.054.000,00	5.924.846.599,00	5.924.846.599,00	96,17
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	6.416.054.000,00	5.924.846.599,00	5.924.846.599,00	96,17
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2.108.322,00	2.108.322,00	100,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	2.108.322,00	2.108.322,00	100,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.466.550,00	133.926.014,00	115.814.530,00	86,48
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.866.500,00	10.647.000,00	6.150.176,00	57,76
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	27.550.000,00	27.550.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	3.950.000,00	3.866.600,00	97,89
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	42.800.000,00	37.813.740,00	88,35
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.600.000,00	48.979.014,00	40.434.014,00	82,55
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	159.539.462,00	119.819.986,00	75,10
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-	39.600.000,00	-	0,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	119.939.462,00	119.819.986,00	75,10
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	919.674.188,00	869.038.389,00	765.613.966,00	88,10
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.101.300,00	78.694.001,00	74.782.165,00	95,03
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	875.572.888,00	787.544.388,00	688.031.801,00	87,36
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.658.500,00	39.042.924,00	36.042.436,00	92,31
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.658.500,00	36.542.924,00	33.642.436,00	92,06

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	2.500.000,00	2.400.000,00	96,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.208.263.000,00	1.996.209.150,00	1.995.526.704,00	99,97
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.208.263.000,00	1.996.209.150,00	1.995.526.704,00	99,97
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.208.263.000,00	1.996.209.150,00	1.995.526.704,00	99,97
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.000.000,00	3.858.358,00	3.615.620,00	93,71
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.000.000,00	3.858.358,00	3.615.620,00	93,71
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	21.000.000,00	3.858.358,00	3.615.620,00	93,71
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.375.000,00	39.873.790,00	37.177.320,00	93,24
	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.375.000,00	39.873.790,00	37.177.320,00	93,24
	Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	34.000.000,00	35.398.790,00	33.052.320,00	93,37
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10.375.000,00	4.475.000,00	4.125.000,00	92,18
Jumlah		9.963.591.188,00	9.186.119.692,00	8.758.662.495,00	95,35

Dalam hal penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari Pagu awal **Rp. 9.963.591.188,00** (*Sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) mengalami Perubahan menjadi **Rp. 9.186.119.692,00** (*Sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta seratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*) dapat di realisasikan sebesar **Rp. 8.758.662.495,00** (*Delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*) dengan persentase **95,35 %**. Jika dibandingkan dengan persentase serapan anggaran tahun 2024 yang mencapai **85,33 %** dapat dinyatakan bahwa persentase serapan anggaran tahun berjalan menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yang berarti

secara proporsional pelaksanaan kegiatan semakin efektif dan tepat waktu. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam perencanaan, pengendalian, serta percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Namun demikian, secara nominal total anggaran tahun sebelumnya lebih besar dibandingkan tahun berjalan. Dengan demikian, meskipun persentase serapan saat ini lebih tinggi, nilai rupiah yang direalisasikan belum tentu lebih besar dari tahun lalu karena basis pagu anggarannya berbeda.

Kondisi ini dapat dimaknai bahwa kinerja pengelolaan anggaran mengalami peningkatan dari sisi efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan anggaran, walaupun kapasitas fiskal atau total pagu yang dikelola pada tahun berjalan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

BAB IV P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka perwujudan “*good governance*”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, realisasi maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi Kecamatan Bunguran Timur yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategis dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata pada Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 106,82 % dengan predikat sangat baik.
- b. Capaian Indeks Pelayanan Publik yaitu 68.39 % dengan predikat B- (Baik dengan Catatan
- c. Pelaksanaan sasaran strategis Kecamatan didukung 6 (Enam) Program sasaran strategis yang diwujudkan dalam 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan dengan jumlah Pagu awal **Rp. 9.963.591.188,00 (Sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah)** mengalami Perubahan menjadi **Rp. 9.186.119.692,00 (Sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta seratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)** dapat di realisasikan sebesar **Rp. 8.758.662.495,00 (Delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah)** dengan persentase **95,35 %**.

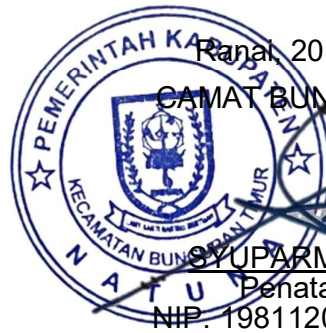
4.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna kedepan. Meskipun terdapat Indikator Kinerja telah mencapai target maupun yang belum mencapai target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat komitmen lingkungan Pemerintahan Kecamatan Bunguran Timur untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
2. Penyusunan rencana program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang ada.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah dan masyarakat.
5. Melakukan perbaikan atas review oleh inspektorat terhadap 4 komponen evaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi AKIP) dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran.
6. Melakukan perbaikan atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) pada Kecamatan Bunguran Timur tahun 2025 terhadap 7 rekomendasi perbaikan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKJIIP) Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas Camat Bunguran Timur kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang

berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dimasa mendatang.

Ranal, 20 Januari 2026
CAMAT BUNGURAN TIMUR

SYUPARMAN, S.E., M.M
Penata Tk. I/III/d
NIP. 19811209 200701 1 005



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HARMIDI, S.A.P.**

Jabatan : **PLT. CAMAT BUNGURAN TIMUR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Ranai, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

HARMIDI, S.A.P.
NIP. 197401011998031008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.52

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	7.679.353.188,00
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	2.208.263.000,00
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	21.000.000,00
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	10.600.000,00
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Rp.	44.375.000,00
Jumlah	Rp.	9.963.591.188,00

Ranai, 13 Januari 2025

Bupati Natuna,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Plt. Camat Bunguran Timur

HARMIDI, S.A.P.

NIP. 197401011998031008



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SYUPARMAN, S.E., M.M**
Jabatan : **PLT. CAMAT BUNGURAN TIMUR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **CEN SUI LAN**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 9.963.591.188,00 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) menjadi Rp. 9.186.119.692,00 (Sembilan Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 24 Oktober 2025

Pihak Kedua,

CEN SUI LAN

Pihak Pertama,

SYUPARMAN, S.E., M.M
NIP. 19811209 200701 1 005

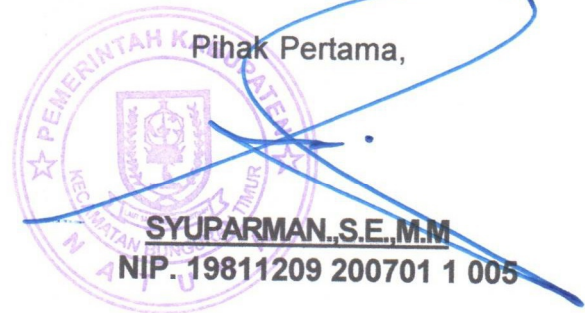
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.05

Jumlah Anggaran :

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.428.274,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.132.801.400,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.996.209.150,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.858.358,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.948.720,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	39.873.790,00
Total	9.186.119.692,00

Ranai, 24 Oktober 2025



2. Hasil Olah Data SKM

PENGOLAHAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : Kantor Camat Bunguran Timur Kabupaten Natuna

ALAMAT : Jl. Masjid Anung, Komplek Natuna Gerbang Utaraku-Provinsi Kep. Riau

NO.	NILAI UNSUR PELAYANAN									
RESP	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	
5	3	3	3	4	4	4	4	3	4	
6	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
7	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
8	3	3	3	4	4	4	3	3	4	
9	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
10	3	4	4	4	4	3	4	3	4	
11	3	3	4	4	4	3	3	4	4	
12	3	4	4	4	3	3	3	4	4	
13	4	3	3	4	3	3	3	2	4	
14	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
15	3	4	4	4	4	3	3	3	4	
16	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
17	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
18	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
19	3	3	3	4	4	4	3	4	4	
20	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
21	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
22	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
23	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
26	3	3	4	4	4	3	3	3	4	
27	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
28	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
29	3	4	3	4	3	4	3	4	4	
30	4	4	3	4	4	3	4	3	4	
31	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
32	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
34	3	4	3	4	4	4	4	3	4	

35	3	4	4	4	4	3	4	3	4
36	3	4	4	4	4	4	4	4	4
37	3	4	4	4	4	3	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	3	3	3	4	4	3	4	3	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	3	4	4	3	4	3	4
42	3	4	4	4	4	4	4	4	3
43	3	4	4	4	4	4	4	4	3
44	4	4	3	4	3	3	3	3	3
45	3	4	4	4	4	4	3	4	4
46	4	3	4	4	4	3	4	4	4
47	3	4	4	4	4	3	4	4	3
48	4	4	4	4	4	3	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	3
50	3	4	4	4	4	4	4	4	3
51	3	4	4	4	4	3	4	4	3
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	3	3	3	4	3	3	3	3	4
56	3	3	4	4	3	3	3	3	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	3	4	4	4	4	4	4	4	4
68	3	4	4	4	3	3	4	4	4
69	3	3	3	4	3	3	4	4	4
70	4	4	4	4	4	4	4	4	3
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	3	3	4	4	4	4	4	4	3
74	4	4	3	4	4	3	3	3	4
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	3	3	3	4	3	3	3	4	4
77	4	4	4	4	4	4	3	3	3

78	4	4	4	4	4	4	4	4	4
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	3	3	3	4	3	4	4	4	4
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	4	4	3	4	4	4	4	3	4
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	4	4	4	4	4	4	4	4	3
88	4	4	4	4	4	4	4	4	3
89	4	4	4	4	4	4	4	4	3
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	4	4	4	4	4	4	4	4	3
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	3	3	3	4	3	3	3	3	4
94	4	4	4	4	4	4	4	4	3
95	4	4	4	4	4	4	4	4	3
96	4	4	4	4	4	4	4	4	3
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ΣNilai /Unsur	344	359	353	387	369	349	358	354	370
NPP / Unsur	3.55	3.70	3.64	3.99	3.80	3.60	3.69	3.65	3.81
NRR tertbg/ unsur	0.390	0.407	0.400	0.439	0.418	0.396	0.406	0.401	0.420
IKM Unit pelayanan									*) 3.68
									**) 91.94

Keterangan :

- U1 s.d. U9 Unsur-Unsur pelayanan
- NRR Nilai rata-rata
- IKM Indeks Kepuasan
- *) Jumlah NRR IKM
- **) Jumlah NRR Tertimbang
- NRR Per Unsur Jumlah nilai per unsur
- NRR tertimbang Jumlah kuesioner yang
- per unsur NRR per unsur x 0,11

SKM UNIT PELAYANAN : 91.94

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61 - 88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI	KATA
U1	Persyaratan pelayanan	3.55	A
U2	Prosedur pelayanan	3.70	A
U3	Waktu pelayanan	3.64	A
U4	Biaya / tarif pelayanan	3.99	A
U5	Produk Pelayanan	3.80	A
U6	Kompetensi petugas	3.60	A
U7	Perilaku petugas pelayanan	3.69	A
U8	Sarana dan prasarana	3.65	A
U9	Penanganan pengaduan	3.81	A

2. Hasil Olah Data SKM

PENGOLAHAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : Kantor Camat Bunguran Timur Kabupaten Natuna
ALAMAT : Jl. Masjid Anung, Komplek Natuna Gerbang Utaraku-Provinsi Kep. Riau
PRIODE : Juli sd Desember (Semester II) Tahun 2025

NO.	NILAI UNSUR PELAYANAN									
RESP	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
8	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
18	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
19	4	3	3	4	4	4	4	4	3	
20	4	4	3	4	4	3	4	3	4	
21	3	3	4	4	4	3	4	4	4	
22	3	3	3	4	4	3	3	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	3	3	4	4	4	3	3	3	4	
25	3	3	3	4	4	3	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	3	3	3	4	4	4	3	3	4	
28	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
29	4	3	3	4	4	4	4	3	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
32	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

34	4	4	4	4	4	3	4	4	3
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	3
37	4	4	4	4	4	3	4	4	3
38	4	4	4	4	3	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	3
40	3	4	3	4	3	4	3	4	4
41	4	3	4	4	4	3	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	4	3	4
43	3	4	4	4	4	4	4	4	4
44	4	3	3	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	3	3	3	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	3	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4	3	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	3	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4	3	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	3	4
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	3	4	4	4	4	3	4	4	4
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	4	4	4	4	4	4	4	4	3
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4	3	4	3	4
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4	4	4	3	4
75	4	4	4	4	4	4	4	4	3
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4

77	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	4	3	3	4	4	4	4	3	3
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4
82	4	4	4	4	4	4	4	3	3
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4
84	4	4	4	4	4	3	4	4	4
85	4	4	4	4	4	4	4	4	3
86	3	4	3	4	4	4	3	3	3
ΣNilai /Unsur	334	333	331	344	336	327	337	321	332
NPP / Unsur	3.88	3.87	3.85	4.00	3.91	3.80	3.92	3.73	3.86
NRR tertbg/ unsur	0.427	0.426	0.423	0.440	0.430	0.418	0.431	0.411	0.425
IKM Unit pelayanan									*) 3.83 **) 95.77

Keterangan :

- U1 s.d. U9 Unsur-Unsur pelayanan
- NRR Nilai rata-rata
- IKM Indeks Kepuasan
- *) Jumlah NRR IKM
- **) Jumlah NRR Tertimbang
- NRR Per Unsur Jumlah nilai per unsur
- Jumlah kuesioner yang
- NRR tertimbang NRR per unsur x 0,11
- per unsur

SKM UNIT PELAYANAN :	95.77	A
-----------------------------	--------------	----------

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61 - 88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

Jl. Poros Mesjid Agung, Komplek Natuna Gerbang Utara-Provinsi Kepulauan Riau
Laman kecbungtim.natunakab.go.id, Pos-el kecbungtim.natunakab.go.id

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kecamatan Bunguran Timur
Periode : Triwulan IV
Tahun Anggaran : 2025

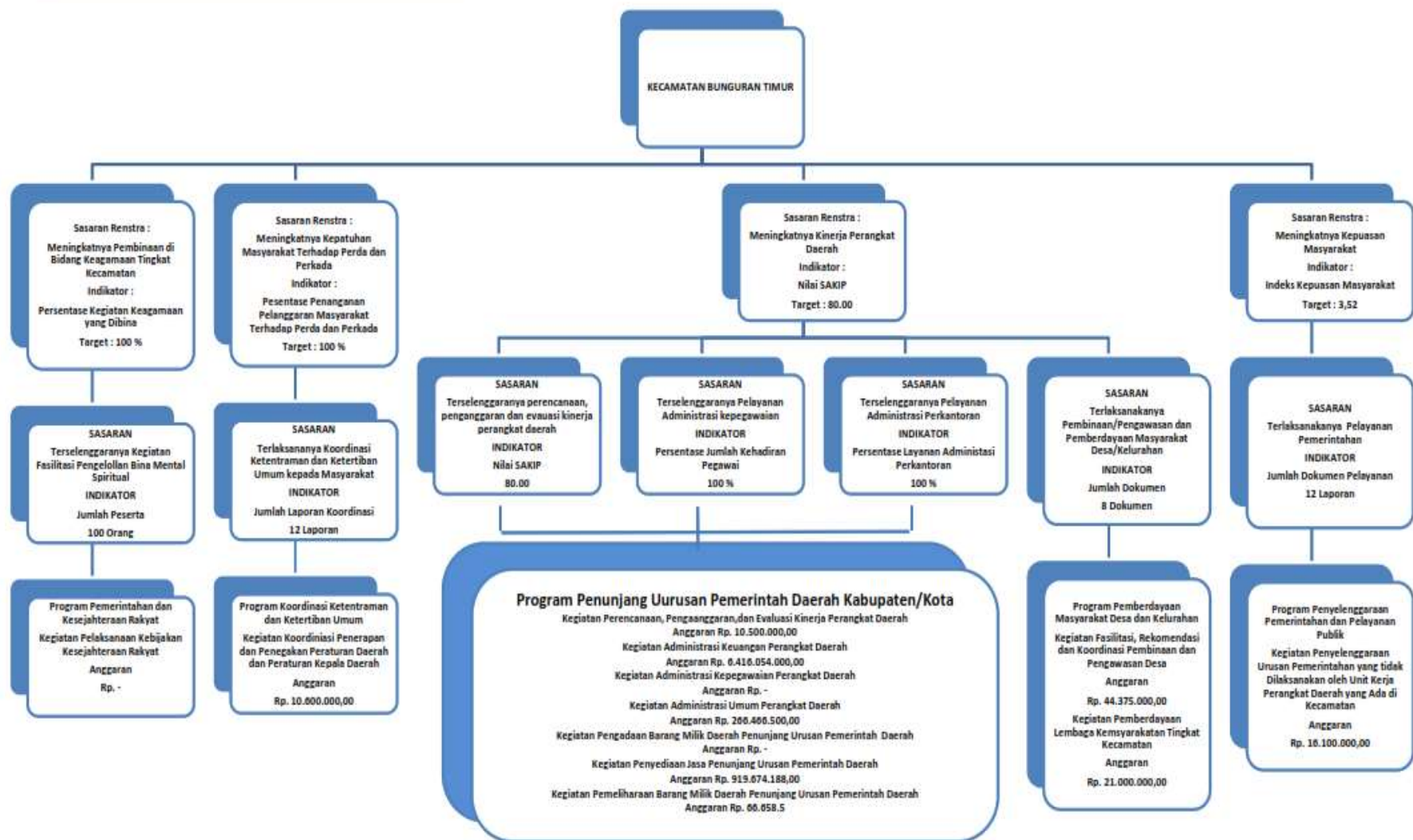
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,05	3,05	100,00

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.976.651.400,00	Rp 6.623.584.361,00	94,94
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 3.428.274,00	Rp 1.714.137,00	50,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 1.996.209.150,00	Rp 1.927.807.627,00	96,57
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 3.858.358,00	Rp 3.615.620,00	93,71
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 9.948.720,00	Rp 8.613.430,00	86,58
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Rp 39.873.790,00	Rp 57.216.069,00	143,49
	Rp 9.029.969.692,00	Rp 8.622.551.244,00	95,49

Ranai, 02 Januari 2026
Camat Bunguran Timur

SYUPARMAN, S.E.,M.M
NIP. 19811209 200704 1 005

CASCADING KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TAHUN 2025



CROSSCUTTING KECAMATAN BUNGURAN TIMUR 2025

